

## DAFTAR PUSTAKA

- Ibnu, Muchlisa. 2023. *Analisis Potensi Kecelakaan Kerja Kegiatan Bongkar Muat Peti Kemas Pada Pekerja Di Terminal Peti Kemas Makassar*. Universitas Hasanuddin.
- Permen-KP 2018 *Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan*.
- Rahma, Lutfiah. 2022. *Analisis Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Kapal Ferry Kmp.Kormomolin Trayek Bira-Pamatat*. Universitas Hasanuddin.
- Mubarakh, Syahrul. 2022. *Analisis Produktivitas Peralatan Bongkar Muat Curah Kering di Pelabuhan Laut Garongkong Kabupaten Barru*. Universitas Hasanuddin.
- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rakesarasin, Yogyakarta
- Undang-Undang No.1 Tahun 1970 *Tentang Keselamatan Kerja*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 *Tentang Pelayaran*.
- Rachman, Tauficqur. *Peraturan Perundangan K3, Dasar K3 dan Urgensi K3*. Materi Pertemuan 2 (online #1). Universitas Esa Unggul.
- Sa'adah, L. (2021). *Metode penelitian ekonomi dan bisnis*. Lppm Universitas Kh. A. Wahab Hasbullah.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia. Universitas Medan Area
- Widi R. 2011. *Uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian epidemiologi kedokteran gigi*. J.K.G Unej. 27-34.



# LAMPIRAN



## Lampiran 1 Tabel aspek keamanan bekerja berdasarkan SMK3

Sumber: PP 50 Tahun 2012

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

3	Peninjauan ulang desain dan kontrak	3.1.1, 3.2.2	3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.1	3.2.3, 3.2.4
4	Pengendalian dokumen	4.1.1	4.1.2, 4.2.1	4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.2.3
5	Pembelian	5.1.1, 5.1.2, 5.2.1	5.1.3	5.1.4, 5.1.5, 5.3.1, 5.4.1, 5.4.2
6	Keamanan bekerja berdasarkan SMK3	6.1.1, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.2.1, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.9, 6.7.4, 6.7.6, 6.8.1, 6.8.2	6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.5.1, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.10, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3, 6.7.5, 6.7.7	6.1.8, 6.6.1, 6.6.2, 6.9.1
7	Standar pemantauan	7.1.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.4.1, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5	7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.4.2	7.3.1, 7.3.2



## Lampiran 2 Tabel penilaian tingkat penerapan SMK3

Sumber: PP 50 Tahun 2012



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

### 3. Kategori Tingkat Lanjutan

Perusahaan yang memenuhi 166 (seratus enam puluh enam) kriteria, kriteria tersebut sebagaimana tercantum dalam kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 pada Tabel 1.

Tingkat penilaian penerapan SMK3 ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk tingkat pencapaian penerapan 0-59% termasuk tingkat penilaian penerapan kurang.
2. Untuk tingkat pencapaian penerapan 60-84% termasuk tingkat penilaian penerapan baik.
3. Untuk tingkat pencapaian penerapan 85-100% termasuk tingkat penilaian penerapan memuaskan.










Tingkat penilaian penerapan SMK3 dapat dilihat pada Tabel 2:

Tabel 2  
Penilaian Tingkat Penerapan SMK3







Kategori Perusahaan	Tingkat Pencapaian Penerapan		
	0-59%	60-84%	85-100%
Kategori tingkat awal (64 kriteria)	Tingkat Penilaian Penerapan Kurang	Tingkat Penilaian Penerapan Baik	Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan
Kategori tingkat transisi (122 kriteria)	Tingkat Penilaian Penerapan Kurang	Tingkat Penilaian Penerapan Baik	Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan
Kategori tingkat lanjutan (6 kriteria)	Tingkat Penilaian Penerapan Kurang	Tingkat Penilaian Penerapan Baik	Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan









Lampiran 3 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelabuhan Penyeberangan Andi Mattalata Barru

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BARRU</b> <b>DINAS PERHUBUNGAN</b> <b>UPT PELABUHAN PENYEBERANGAN ANDI MATTALATTA</b>		Nomor SOP Tgl. Pembuatan Tgl. Revisi Tgl. Efektif Disahkan oleh		Kepala UPT Pelabuhan <b>Haeruddin, S.Sos</b>			
		Nama SOP		Pelayanan Pintu Utama			
<b>Dasar Hukum :</b> 1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 2. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022		<b>Kualifikasi Pelaksana :</b> 1. SLTA		<b>Kebutuhan Personil :</b> 1. 3 orang			
<b>Keterkaitan :</b> 1. SOP Pelayanan Perparkiran 2. SOP Layanan Pintu Kedua		<b>Peralatan / Perlengkapan :</b> 1. Buku Pencatatan 2.		<b>Pencatatan dan Pendataan :</b> Kendaraan, penumpang, penumpang dan Pergantar yang masuk dalam areal Pelabuhan			
<b>Peringatan :</b>							
No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Keterangan	Mutu Belas		Keterangan
		Ka UPTD	Ka TU		Waktu	Output	
<b>EMBARKASI</b>							
1	Menyapa pengguna layanan, dan menanyakan maksudnya			 Pengguna layanan bermaksud melewati Pintu Utama	1 menit	Menyampaikan nilai retribusi yang dikenakan	
2	Menerima uang dan menyerahkan karcis Retribusi			 Pengguna layanan meninggalkan loket karcis	1 menit	Pengguna layanan memegang karcis retribusi yang telah dibayar	
3	Petugas palang pintu memeriksa karcis yang diperlihatkan			 Pengguna layanan memperlihatkan karcis yang dimilikinya	1 menit	Petugas palang pintu, memperlihatkan pengguna layanan lanjut dengan mengikuti petunjuk	
4	Memberika informasi lain yang dibutuhkan kepada pengguna layanan (masyarakat)			 Pengguna layanan bertanya informasi lainnya	1 menit	Pengguna layanan memahami hal yang dipertanyakan	
<b>DEBARKASI</b>							
1	Meminta pengemudi berhenti, selanjutnya mengarahkan ke loket, guna membayar retribusi jasa dermaga.			 Kendaraan meninggalkan kapal menuju pintu kedua		Kendaraan menuju pintu utama	
2	Menerima uang dan menyerahkan karcis Retribusi, sesuai golongan kendaraan			 Pengguna layanan meninggalkan loket karcis	1 menit	Pengguna layanan memegang karcis retribusi yang telah dibayar	
3	Petugas palang pintu memeriksa karcis yang diperlihatkan			 Pengguna layanan memperlihatkan karcis yang dimilikinya	1 menit	Petugas palang pintu, memperlihatkan pengguna layanan lanjut	
4	Memberika informasi lain yang dibutuhkan kepada pengguna layanan (masyarakat)			 Pengguna layanan bertanya informasi lainnya	1 menit	Pengguna layanan memahami hal yang dipertanyakan	








 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BARRU</b> <b>DINAS PERHUBUNGAN</b> <b>UPT PELABUHAN PENYEBERANGAN ANDI MATTALATTA</b>	Tgl. Pembuatan							
	Tgl. Revisi							
	Tgl. Efektif							
	Disahkan oleh	Kepala UPT Pelabuhan <b>Haeruddin, S.Sos</b>						
	<b>Nama SOP</b>	<b>Pelayanan Perparkiran</b>						
<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>							
1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016	1. SLTA							
2. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022	<b>Kebutuhan Personil :</b>							
<b>Keterkaitan :</b>	1. 3 orang							
1. SOP Pemeriksaan Pas Penumpang	<b>Peralatan / Perlengkapan :</b>							
2. SOP Parkir	1. Buku Pencatatan							
<b>Peringatan :</b>	2.							
	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>							
	Kendaraan penumpang, penumpang dan pengantar yang masuk dalam areal Pelabuhan							
No.	Uraian Procedur	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Ka UPTD	Ka TU	Staf		Waktu	Output	
1	Mengarahkan parkir, sesuai zona parkir kendaraan				Pengguna layanan meninggalkan pintu utama	1 merit	Pengguna layanan memarkir kendaraannya sesuai peruntukan dengan teratur	
					KMP siap melakukan pemutaran	1 merit	Pemilik kendaraan menuju pintu ladua	
					Pengguna layanan bertanya informasi lainnya	1 merit	Pengguna layanan memahami hal yang dipertanyakan	
1	Mengarahkan parkir, sesuai zona parkir kendaraan				Pengguna layanan meninggalkan pintu utama	1 merit	Pengguna layanan memarkir kendaraannya sesuai peruntukan dengan teratur	
					Pengguna layanan bertanya informasi lainnya	1 merit	Pengguna layanan memahami hal yang dipertanyakan	



 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BARRU</b> <b>DINAS PERHUBUNGAN</b> <b>UPT PELABUHAN PENYEBERANGAN ANDI MATTALATTA</b>	Tgl. Pembuatan							
	Tgl. Revisi							
	Tgl. Efektif							
	Disahkan oleh		Kepala UPT Pelabuhan <b>Haeruddin, S.Sos</b>					
	<b>Nama SOP</b>		<b>Layanan Pintu Terminal Penumpang</b>					
<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>							
1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016	1. SLTA							
2. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022	<b>Kebutuhan Personil :</b>							
	1. 3 orang							
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan :</b>							
1. SOP Pemeriksaan Pas Penumpang	1. Buku Pencatatan							
2. SOP Parkir	2.							
	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>							
<b>Peringatan :</b>	Penumpang yang akan menyeberang							
No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Ka UPTD	Ka TU	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
	<b>EMBARKASI</b>							
1	Menyapa pengguna layanan, mengarahkan untuk akses tiket dan istirahat di ruangan tunggu sementara				Pengguna layanan menuju terminal sementara	1 menit	Pengguna layanan snti akses tiket	
2	Menghimbau pengguna layanan senantiasa memelihara kebersihan dan merokok pada tempat yang tersedia				Pengguna layanan istirahat di terminal sementara	1 menit	Pengguna layanan beristirahat dengan tertib	
3	Pintu Terminal dibuka				Komentator memperulahkan pengguna layanan memasuki ruangan tunggu	1 menit	Pengguna layanan snti melewati pintu pemeriksaan	
4	Petugas memeriksa dokumen keberangkatan pengguna layanan				Pengguna layanan memasuki Terminal Penumpang		Pengguna layanan beristirahat di ruang tunggu penumpang	
5	Memberika informasi lain yang dibutuhkan kepada pengguna layanan (masyarakat)				Pengguna layanan bertanya informasi lainnya	1 menit	Pengguna layanan memahami hal yang dipertanyakan	
	<b>DEBARKASI</b>							











 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BARRU</b> <b>DINAS PERHUBUNGAN</b> <b>UPT PELABUHAN PENYEBERANGAN ANDI MATTALATTA</b>	Tgl. Pembuatan							
	Tgl. Revisi							
	Tgl. Efektif							
	Disahkan oleh		Kepala UPT Pelabuhan <b>Haeruddin, S.Sos</b>					
	<b>Nama SOP</b>		<b>Layanan Terminal Penumpang</b>					
<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>							
1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016	1. SLTA							
2. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022	<b>Kebutuhan Personil :</b>							
	1. 2 orang							
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan :</b>							
1. SOP Pemeriksaan Pas Penumpang	1. Buku Pencatatan							
2. SOP Parkir	2.							
	3.							
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>							
	Penumpang yang akan menyeberang							
No.	Uraian Prosedur	Pelaksana		Staf	Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Ka UPTD	Ka TU			Waktu	Output	
	<b>EMBARKASI</b>							
1	Menyapa pengguna layanan, mengarahkan untuk istirahat sementara sambil menunggu paggilan naik kapal				Pengguna layanan memasuki ruangan tunggu penumpang	1 menit	Pengguna layanan beristirahat	
2	Menghimbau pengguna layanan senantiasa memelihara kebersihan dan merokok pada tempat yang tersedia				Pengguna layanan beristirahat	1 menit	Pengguna layanan menikmati fasilitas ruangan tunggu penumpang	
3	Memberikan informasi lain yang dibutuhkan kepada pengguna layanan (masyarakat)				Pengguna layanan bertanya informasi lainnya	1 menit	Pengguna layanan memahami hal yang dipertanyakan	
4	Pintu ruangan tunggu penumpang dibuka				Komentator memperulihkan penumpang menaiki kapal	1 menit	Pengguna layanan melewati pintu keluar ruangan tunggu penumpang	
	<b>DEBARKASI</b>							











 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BARRU</b> DINAS PERHUBUNGAN UPT PELABUHAN PENYEBERANGAN ANDI MATTALATTA</p>	Tgl. Pembuatan	
	Tgl. Revisi	
	Tgl. Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala UPT Pelabuhan <b>Haeruddin, S.Sos</b>
	<b>Nama SOP</b>	<b>Layanan Lintasan Pejalan Kaki</b>
<b>Dasar Hukum :</b>		
1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 2. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022		
<b>Keterkaitan :</b>		
1. SOP Pemeriksaan Pas Penumpang 2. SOP Parkir		
<b>Peringatan :</b>		
<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>		
1. SLTA		
<b>Kebutuhan Personil :</b>		
1. 3 orang		
<b>Peralatan / Perlengkapan :</b>		
1. Buku Pencatatan 2.		
<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>		
Penumpang yang akan menyeberang		

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Ka UPTD	Ka TU	Staf		Waktu	Output	
<b>EMBARKASI</b>								
1	Mengarahkan pengguna layanan berjalan/bergerak pada koridor yang telah ditentukan				Pengguna layanan berjalan menuju dermaga	1 merit	Pengguna layanan menuju kapal	
2	Mengingatkan pengguna layanan senantiasa tertib, mengingat barang bawaan dan tidak saling mendahului				Pengguna layanan berjalan menuju dermaga dengan tertib	1 merit	Pengguna layanan menuju kapal dengan tertib	
3	Memberika informasi lain yang dibutuhkan kepada pengguna layanan (masyarakat)			 	Pengguna layanan bertanya informasi lainnya	1 merit	Pengguna layanan memahami hal yang dipertanyakan	
<b>DEBARKASI</b>								
1	Mengarahkan pengguna layanan berjalan/bergerak pada koridor yang telah ditentukan				Pengguna layanan berjalan menuju pintu kedua	1 merit	Pengguna layanan menuju tempat parkir/pintu utama	
2	Mengingatkan pengguna layanan senantiasa tertib, mengingat barang bawaan dan tidak saling mendahului				Pengguna layanan berjalan/bergerak menuju pintu kedua	1 merit	Pengguna layanan menuju tempat parkir/pintu utama	
3	Memberika informasi lain yang dibutuhkan kepada pengguna layanan (masyarakat)			 	Pengguna layanan bertanya informasi lainnya	1 merit	Pengguna layanan memahami hal yang dipertanyakan	



 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BARRU</b> <b>DINAS PERHUBUNGAN</b> <b>UPT PELABUHAN PENYEBERANGAN ANDI MATTALATTA</b></p>	Tgl. Pembuatan	
	Tgl. Revisi	
	Tgl. Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala UPT Pelabuhan <b>Haeruddin, S.Sos</b>
	<b>Nama SOP</b>	<b>Layanan Pintu Kedua</b>
<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>	
1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016	1. SLTA SLTA	
2. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022	<b>Kebutuhan Personil :</b>	
<b>Keterkaitan :</b>	1. 3 orang	
1. SOP Pemeriksaan Pas Penumpang	<b>Peralatan / Perlengkapan :</b>	
2. SOP Parkir	1. Buku Pencatatan	
<b>Peringatan :</b>	2.	
	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>	
	Kendaraan yang akan menyeberang	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan
		Ka UPTD	Ka TU	Staf	Waktu	Output	
1	<b>EMBARKASI</b> Memeriksa dokumen keberangkatan kendaraan, membuka pintu dan memisahkan kendaraan menuju dermaga				Pengguna layanan bergerak ke pintu kedua	1 menit	Pengguna layanan memperlihatkan dokumen keberangkatan
					Pengguna layanan bergerak menuju dermaga dengan tertib	1 menit	Pengguna layanan menuju kapal dengan tertib
					Pengguna layanan bertanya informasi lainnya	1 menit	Pengguna layanan memahami hal yang
1	<b>DEBARKASI</b> Mengarahkan pengguna layanan berjalan/bergerak pada koridor yang telah ditentukan				Pengguna layanan bergerak menuju pintu utama	1 menit	Pengguna layanan menuju ke tempat parkir/pintu utama
					Pengguna layanan bergerak melewati pintu kedua	1 menit	Pengguna layanan menuju tempat parkir/pintu utama
					Pengguna layanan bertanya informasi lainnya	1 menit	Pengguna layanan memahami hal yang dipertanyakan



## Lampiran 4 Sertifikat keterampilan tenaga kerja

	<b>KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG</b>	
012PMITV23	<b>SERTIFIKAT DIKLAT KETERAMPILAN PELAYARAN OPERATOR TENAGA KERJA BONGKAR MUAT</b> <small>CERTIFICATE OF TRAINING AND EDUCATION FOR SHIPPING AGENTS FOR LOADING AND UNLOADING LABOR SPECIALISTS</small>	012PQPM16413
Direktur Politeknik Pelayaran Barombong Menyatakan bahwa		
N a m a	<b>ANDI ANWAR</b>	
Nomor Induk Peserta Diklat	<b>23.06.012</b>	
Tempat / Tanggal Lahir	<b>BARRU, 24 APRIL 1975</b>	
Telah mengikuti Diklat <b>KETERAMPILAN PELAYARAN OPERATOR TENAGA KERJA BONGKAR MUAT</b>		
Diselenggarakan di Politeknik Pelayaran Barombong		
Pada Periode <b>06 November 2023 sampai dengan 07 November 2023.</b>		
<p>Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan Pada Jabatan Kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Barang – Barang Umum (General Cargo) dan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 109 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori Pengangkutan dan Pergudangan golongan pokok pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan pada jabatan kerja tenaga kerja bongkar muat (TKBM) barang-barang umum (general cargo).</p> <p>Based on Decree of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number: 298 of 2020 concerning of the determination Indonesian national work competency standards for the category of transportation and warehousing, the main group of warehousing and transportation support activities at the loading and unloading workforce for general goods (general cargo) and Decree of the Minister of the Transportation of the Republic of Indonesia Number: KM 109 of 2021 Concerning the application of Indonesian national work competency standards for the category of transportation and warehousing, the main group of warehousing and transportation support activities at the loading and unloading manpower for general goods (general cargo).</p>		
 TANDA TANGAN PEMILIK Signature of the holder	 POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG	<p>Makassar, 09 November 2023</p> <p>DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG</p> <p> CAHYO MUNTAHA, M.Si, M.Mr. NIP. 19670712 199008 1 001</p>


  

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI</b> <b>CAHYO MUNTAHA, M.Si, M.Mr.</b> Ketua Penyelenggara Chief Person
	<p>Alas Nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi On Behalf of Indonesian Professional Certification Authority Lembaga Sertifikasi Profesi Politeknik Pelayaran Barombong Professional Certification's Body of Barombong Maritime Polytechnic</p>
<b>TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) BARANG-BARANG UMUM (GENERAL CARGO) GENERAL GOODS LOADING AND UNLOADING WORKERS</b>	<p>Sertifikat ini berlaku untuk 3 (tiga) Tahun This certificate is valid for 3 (three) Years Makassar, 20 November 2023</p>
<b>PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN TRANSPORTATION AND WAREHOUSE</b>	<p>Dengan kualifikasi / kompetensi : With qualification / competency</p>
<b>SERTIFIKAT KOMPETENSI CERTIFICATE OF COMPETENCE</b>	<p>No. Reg BMP 907 00074 2023 Telah Kompeten pada bidang Is competent in the area of</p>
<b>ANDI ANWAR</b>	<p>Dengan ini menyatakan bahwa This is to certify that</p>
	11889897



**DAFTAR KOMPETENSI DAN MATERI DIKLAT KETERAMPILAN PELAYARAN OPERATOR TENAGA KERJA BONGKAR MUAT**  
*Detailed of Teaching Syllabus of Training and Education for Shipping Skills for Loading and Unloading Labor Operators*  
*Duration Training and Education: 28 Hours (Theory: 6 Hours, Practice: 18 Hours and Examination and Assessment: 4 Hours)*


NO	UNIT KOMPETENSI	MATERI DIKLAT (SUBJECT)
I.	Pengantar Umum Kegiatan Bongkar Muat	
II.	Melaksanakan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Tempat Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyapkan perlengkapan keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;</li> <li>2. Menerapkan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja;</li> <li>3. Membuat laporan penerapan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);</li> </ol>
III.	Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan;</li> <li>2. Mengkomunikasikan instruksi kerja kepada bawahan;</li> <li>3. Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait;</li> <li>4. Melaksanakan koordinasi dengan pihak luar;</li> </ol>
IV.	Melaksanakan Kegiatan Stevedoring	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi barang umum (general cargo) yang akan dipindah dan disusun melalui briefing foreman/mandor;</li> <li>2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan stevedoring bongkar muat barang umum (general cargo) dari/ke paika kapal ke/dari dermaga/tongkang/truk;</li> <li>3. Melaksanakan kerja bongkar muat barang umum (general cargo) dari/ke paika kapal ke/dari dermaga/tongkang/truk;</li> <li>4. Mengendalikan kerja bongkar muat barang umum (general cargo) dari/ke paika kapal ke/dari dermaga/tongkang/truk;</li> <li>5. Mengawasi kerja bongkar muat barang umum (general cargo) dari/ke paika kapal ke/dari dermaga/tongkang/truk;</li> </ol>
V.	Melaksanakan Kegiatan Cargodoring	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi barang umum (general cargo) yang akan dipindah dan disusun secara manual;</li> <li>2. Mengkoordinasikan anggota regu (gang) kerja pemindahan dan penyusunan barang umum (general cargo);</li> <li>3. Melepaskan barang dan tali sling/jala-jala extake di dermaga;</li> <li>4. Mengangkut dari sisi kapal di dermaga ke gudang/lapangan penumpukan barang;</li> <li>5. Menyerahkan kepada receiving/delivery di gudang/lapangan penumpukan barang atau sebaliknya;</li> </ol>
VI.	Melaksanakan Kegiatan Receiving/Delivery	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi barang umum (general cargo) yang akan diterima dan diserahkan melalui briefing foreman/mandor;</li> <li>2. Mengkoordinasikan anggota regu (gang) kerja penerimaan dan penyerahan umum (general cargo);</li> <li>3. Menerima barang kendaraan angkut ke gudang/lapangan penumpukan;</li> <li>4. Menyerahkan barang sampai tersusun di atas kendaraan dan menerima barang sampai tersusun di gudang/lapangan penumpukan;</li> <li>5. Melaksanakan keamanan barang pada kegiatan receiving/delivery;</li> </ol>

Makassar, 09 November 2023  
 KA BAG ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KETARUNAAN  
 POLITEKNIK PELAYARAN BARDOMBONG  
  
 HERI SULARNO, M.H., M.M., E  
 NIP. 19661206.199903.1.001

**Daftar Unit Kompetensi**

NO	Code of Competence (UK)	Code of Competence (UK)
1	H-203BMB01.000.1	Menyapkan perlengkapan keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
2	H-203BMB01.000.2	Menerapkan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja;
3	H-203BMB01.000.3	Membuat laporan penerapan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
4	H-203BMB01.000.4	Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan;
5	H-203BMB01.000.5	Mengkomunikasikan instruksi kerja kepada bawahan;
6	H-203BMB01.000.6	Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait;
7	H-203BMB01.000.7	Melaksanakan koordinasi dengan pihak luar;
8	H-203BMB01.000.8	Mengidentifikasi barang umum (general cargo) yang akan dipindah dan disusun melalui briefing foreman/mandor;
9	H-203BMB01.000.9	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan stevedoring bongkar muat barang umum (general cargo) dari/ke paika kapal ke/dari dermaga/tongkang/truk;
10	H-203BMB01.000.10	Melaksanakan kerja bongkar muat barang umum (general cargo) dari/ke paika kapal ke/dari dermaga/tongkang/truk;
11	H-203BMB01.000.11	Mengendalikan kerja bongkar muat barang umum (general cargo) dari/ke paika kapal ke/dari dermaga/tongkang/truk;
12	H-203BMB01.000.12	Mengawasi kerja bongkar muat barang umum (general cargo) dari/ke paika kapal ke/dari dermaga/tongkang/truk;
13	H-203BMB01.000.13	Mengidentifikasi barang umum (general cargo) yang akan dipindah dan disusun secara manual;
14	H-203BMB01.000.14	Mengkoordinasikan anggota regu (gang) kerja pemindahan dan penyusunan barang umum (general cargo);
15	H-203BMB01.000.15	Melepaskan barang dan tali sling/jala-jala extake di dermaga;
16	H-203BMB01.000.16	Mengangkut dari sisi kapal di dermaga ke gudang/lapangan penumpukan barang;
17	H-203BMB01.000.17	Menerima barang kendaraan angkut ke gudang/lapangan penumpukan;
18	H-203BMB01.000.18	Mengerahkan barang sampai tersusun di atas kendaraan dan menerima barang sampai tersusun di gudang/lapangan penumpukan;
19	H-203BMB01.000.19	Melaksanakan keamanan barang pada kegiatan receiving/delivery;

Makassar, 30 November 2023

  
 Zulfahri  
 Kepala FGD  
 29/11/2023  
 NIP. 19650101.198203.1.001

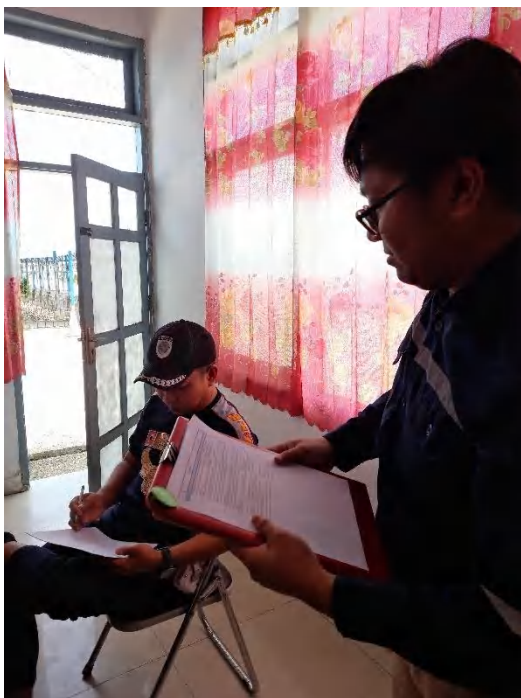


Lampiran 5 Dokumentasi hal-hal yang perlu dibenahi pada Pelabuhan Penyeberangan Andi Mattalata Barru



Lampiran 6 Dokumentasi pengisian kuesioner oleh responden

















Aspek	Compliance		Compliance		Compliance		Compliance		Compliance		Compliance		Compliance		
	Ya	Tidak	N/A	Ya	Tidak	N/A	Ya	Tidak	N/A	Ya	Tidak	N/A	Ya	Tidak	N/A
Apakah hasil identifikasi dan uji coba diujikan secara rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang pada penyelesaian alat/sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan?	1			1			1			1			1		
Apakah tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko?	1			1			1			1			1		
Apakah petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja?	1			1			1			1			1		
Apakah instruksi/prosedur keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas dan meyorok serta diketahui oleh seluruh tenaga kerja di perusahaan?	1			1			1			1			1		
Apakah peralatan, dan sistem tools bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan?	1			1			1			1			1		
Apakah jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau standar dan diteliti oleh petugas yang berkompeten dan berwenang?	1			1			1			1			1		
<b>Pertanyaan</b>															
Apakah perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis?	1			1			1			1			1		
Apakah petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan?	1			1			1			1			1		
<b>Aspek</b>															
<b>Pertanyaan</b>															
Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat	1			1			1			1			1		
Apakah prosedur untuk pemulih kondisi tenaga kerja maupun sarana dan peralatan produksi yang mengalami kerusakan telah ditetapkan dan dapat diterapkan sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja?	1			1			1			1			1		



Aspek	9		10		11		12		13		14		15		16	
	MUH. RISLI		HAERUDDIN		UMRAH		RUSNIWATI		RISNAWATI		FATMAN		SARKIAH		SOFYAN	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Apakah terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk mengendalikan resiko kecelakaan yang teridentifikasi?	1		1		1		1		1		1		1		1	
Apakah saat pengembangan atau saat melakukan modifikasi atau petunjuk kerja yang biasanya anda lakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan, standar serta pedoman teknis yang rele van?	1		1		1		1		1		1		1		1	
Apakah terdapat sistem izin kerja untuk tugas berisiko tinggi?	1		1		1		1		1		1		1		1	
Apakah dari perencanaan tempat kerja Anda disediakan alat pelindung diri sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi layak pakai?	1		1		1		1		1		1		1		1	
Apakah alat pelindung diri yang digunakan dipertahakan terdapat dokumen layak pakai sesuai dengan standar dan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku?	1		1		1		1		1		1		1		1	
Apakah ada evaluasi berkala untuk upaya pengendalian risiko apabila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pada proses kerja?	1		1		1		1		1		1		1		1	
<b>Pertanyaan</b>	Compliance	Tidak	Ya	Ya	Compliance	Tidak	Ya	Ya	Compliance	Tidak	Ya	Ya	Compliance	Tidak	Ya	Ya
Apakah ada pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan?	1		1		1		1		1		1		1		1	
Apakah setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat risiko tugas?	1		1		1		1		1		1		1		1	
Apakah pengawasan/penyelidikan serta dalam identifikasi bahaya dan membuat upaya pengendalian?	1		1		1		1		1		1		1		1	
Apakah pengawasan/penyelidikan dilaksanakan dalam melakukan penyelidikan dan pembuatan laporan terhadap terjadinya kecelakaan dan penyebab akibat kerja?	1		1		1		1		1		1		1		1	
Apakah pengawasan/penyelidikan serta dalam proses konsultasi?	1		1		1		1		1		1		1		1	
<b>Pertanyaan</b>	Compliance	Tidak	Ya	Ya	Compliance	Tidak	Ya	Ya	Compliance	Tidak	Ya	Ya	Compliance	Tidak	Ya	Ya
Apakah persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk seleksi dan menempatkan tenaga kerja?	1		1		1		1		1		1		1		1	
Apakah pengakuan pekerjaan harus berdasarkan kemampuan dan keterampilan serta kewenangan yang dimiliki?	1		1		1		1		1		1		1		1	
<b>Pertanyaan</b>	Compliance	Tidak	Ya	Ya	Compliance	Tidak	Ya	Ya	Compliance	Tidak	Ya	Ya	Compliance	Tidak	Ya	Ya
Apakah pengusaha atau pengurus melakukan penilaian risiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah yang memerlukan pembatasan izin masuk?	1		1		1		1		1		1		1		1	
Apakah terdapat pengendalian atas daerah/tempat dengan pembatasan izin masuk?	1		1		1		1		1		1		1		1	
Apakah tersedia fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis?	1		1		1		1		1		1		1		1	
Apakah timbunan/ranbu KS sudah terpasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis?	1		1		1		1		1		1		1		1	
<b>Pertanyaan</b>	Compliance	Tidak	Ya	Ya	Compliance	Tidak	Ya	Ya	Compliance	Tidak	Ya	Ya	Compliance	Tidak	Ya	Ya
<b>Aspek</b>	Ya	Tidak	Ya	Ya	Compliance	Tidak	Ya	Ya	Compliance	Tidak	Ya	Ya	Compliance	Tidak	Ya	Ya
<b>Aspek</b>	Ya	Tidak	Ya	Ya	Compliance	Tidak	Ya	Ya	Compliance	Tidak	Ya	Ya	Compliance	Tidak	Ya	Ya
Seleksi dan Penempatan Personil	1		1		1		1		1		1		1		1	
Area Terbatas	1		1		1		1		1		1		1		1	
<b>Aspek</b>	Ya	Tidak	Ya	Ya	Compliance	Tidak	Ya	Ya	Compliance	Tidak	Ya	Ya	Compliance	Tidak	Ya	Ya
<b>Aspek</b>	Ya	Tidak	Ya	Ya	Compliance	Tidak	Ya	Ya	Compliance	Tidak	Ya	Ya	Compliance	Tidak	Ya	Ya





Aspek	Compliance		Compliance		Compliance		Compliance		Compliance		Compliance		Compliance		
	Ya	Tidak	N/A	Ya	Tidak	N/A	Ya	Tidak	N/A	Ya	Tidak	N/A	Ya	Tidak	N/A
Apakah hasil identifikasi dan uji coba diujikan secara rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang pada penyelesaian alat/sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan?	1			1			1			1			1		
Apakah tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko?	1			1			1			1			1		
Apakah prosedur/prosedur keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas dan menyolok serta diketahui oleh seluruh tenaga kerja di perusahaan?	1			1			1			1			1		
Apakah pelatihan, dan sistem tanda bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, uji dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan?	1			1			1			1			1		
Apakah jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau standar dan dimilai oleh petugas yang berkompeten dan berwenang?	1			1			1			1			1		
<b>Pertanyaan</b>															
Apakah perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis?	1			1			1			1			1		
Apakah petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan?	1			1			1			1			1		
<b>Aspek</b>															
<b>Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat</b>															
Apakah prosedur untuk pemulih kondisi tenaga kerja maupun sarana dan peralatan produksi yang mengalami kerusakan telah ditetapkan dan dapat diterapkan sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja?	1			1			1			1			1		















Aspek	Compliance		Compliance		Compliance		Compliance		Compliance		Compliance		Compliance		
	Ya	Tidak	N/A	Ya	Tidak	N/A	Ya	Tidak	N/A	Ya	Tidak	N/A	Ya	Tidak	N/A
Apakah hasil identifikasi dan uji coba diujikan secara rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang pada penyelesaian alat/sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan?	1			1			1			1			1		
Apakah tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko?	1			1			1			1			1		
Apakah petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja?	1			1			1			1			1		
Apakah instruksi/prosedur keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas dan menyolok serta diketahui oleh seluruh tenaga kerja di perusahaan?	1			1			1			1			1		
Apakah peralatan, dan sistem tidak bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, uji dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan?	1			1			1			1			1		
Apakah jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau standar dan dimilai oleh petugas yang berkompeten dan berwenang?	1			1			1			1			1		
<b>Pertanyaan</b>															
Apakah perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis?	1			1			1			1			1		
Apakah petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan?	1			1			1			1			1		
<b>Aspek</b>															
<b>Pertanyaan</b>															
Apakah prosedur untuk pemeliharaan kondisi tenaga kerja maupun sarana dan peralatan produksi yang mengalami kerusakan telah ditetapkan dan dapat diterapkan sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja?	1			1			1			1			1		

## Lampiran 8 Hasil rekapan kuesioner tiap aspek

- Aspek Sistem Kerja

Pertanyaan	Compliance					
	Ya		Tidak		N/A	
Kompetensi petugas terkait bahaya dari pekerjaan	31	97%	1	3%	0	0%
Peningkatan upaya pengendalian resiko	32	100%	0	0%	0	0%
SOP pengendalian resiko yang valid	30	94%	0	0%	2	6%
SOP didasari aturan yang jelas	29	91%	1	3%	2	6%
Izin kerja	29	91%	3	9%	0	0%
APD	29	91%	3	9%	0	0%
Kelayakan APD	30	94%	2	6%	0	0%
Evaluasi upaya pengendalian resiko	29	91%	1	3%	2	6%

- Pengawasan

Pertanyaan	Compliance					
	Ya		Tidak		N/A	
Terdapat pengawas	28	88%	1	3%	3	9%
Seluruh pekerja di awasi	27	84%	2	6%	3	9%
Keikutsertaan pengawas dalam indentifikasi dan penanggulangan bahaya	27	84%	2	6%	3	9%
Evaluasi kecelakaan kerja diberikan kepada pihak pelabuhan	27	84%	2	6%	3	9%
Pengawas ikut dalam konsultasi	12	38%	2	6%	18	56%

- Seleksi dan penempatan personil

Pertanyaan	Compliance					
	Ya		Tidak		N/A	
Dalam seleksi terdapat persyaratan tugas dan kesehatan	31	97%	1	3%	0	0%
Dalam penempatan terdapat persyaratan tugas dan kesehatan	32	####	0	0%	0	0%

- Area terbatas

Pertanyaan	Compliance					
	Ya		Tidak		N/A	
Pembatasan area lingkungan kerja	17	53%	0	0%	15	47%
Izin masuk daerah tertentu	14	44%	0	0%	18	56%
dan pelayanan tersedia	30	94%	0	0%	2	6%
ambu K3 sesuai standar	31	97%	0	0%	1	3%

neliharaan, perbaikan, dan perubahan sarana produksi



Pertanyaan	Compliance					
	Ya		Tidak		N/A	
Pemeriksaan dan pemeliharaan alat terjadwal	15	47%	0	0%	17	53%
Pemeliharaan dokumen-dokumen	8	25%	0	0%	24	75%
Surat kelayakan alat	20	63%	3	9%	9	28%
Terdapat petugas yang berwenang	26	81%	0	0%	6	19%
SOP terkait alat yang terkendala	5	16%	2	6%	25	78%
Prosedur permintaan pemeliharaan alat	6	19%	3	9%	23	72%
Terdapat penanda bagi alat yang bermasalah	8	25%	2	6%	22	69%
Sistem penguncian pengoperasian	12	38%	1	3%	19	59%
Prosedur penjamin keselamatan dan kesehatan bagi semua orang	15	47%	1	3%	16	50%
Terdapat penanggung jawab alat dan fasilitas	13	41%	0	0%	19	59%

- Pelayanan

Pertanyaan	Compliance					
	Ya		Tidak		N/A	
SOP jaminan pelayanan bagi penyedia pelayanan	10	31%	1	3%	21	66%
SOP jaminan pelayanan bagi penerima layanan	25	78%	1	3%	6	19%

- Kesiapan untuk menangani keadaan darurat

Pertanyaan	Compliance					
	Ya		Tidak		N/A	
Terdapat SOP keadaan darurat	28	88%	3	9%	1	3%
Petugas keadaan darurat yang kompeten	26	81%	2	6%	4	13%
Petugas keadaan bersertifikat	25	78%	4	13%	3	9%
Petugas keadaan darurat yang jelas	31	97%	1	3%	0	0%
Instruksi dan SOP keadaan darurat mudah didapat	26	81%	2	6%	4	13%
Monitoring alat yang valid	9	28%	0	0%	23	72%
Ketersediaan alat keadaan darurat	22	69%	2	6%	8	25%

tolongan pertama pada kecelakaan



Pertanyaan	Compliance		
	Ya	Tidak	N/A

Terdapat alat P3K yang valid	29	91%	1	3%	2	6%
Terdapat petugas P3K yang kompeten	15	47%	16	50%	1	3%

- Rencana dan pemulihan keadaan darurat

Pertanyaan	Compliance					
	Ya		Tidak		N/A	
SOP pemulihan sarana produksi pasca bencana	31	97%	0	0%	1	3%





Lampiran 9 Hasil observasi tiap aspek

Aspek	Pertanyaan	Observasi	
		Bukti	Keterangan
Sistem Kerja	Petugas yang kompeten telah mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu proses kerja.	Tidak ada	Dari hasil wawancara terhadap seluruh pekerja dan pegawai di pelabuhan, mereka mengerti akan bahaya yang dapat terjadi pada tempat mereka bekerja
	Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan, maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian.	Tidak ada	Dari hasil wawancara terhadap seluruh pekerja dan pegawai di pelabuhan, beberapa belum mengetahui dan beberapa sudah mengetahui upaya apa yang di lakukan jika terjadi kecelakaan di tempat bekerja
	Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk mengendalikan risiko yang teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari personel yang kompeten serta tenaga kerja yang terkait dan disahkan oleh orang yang berwenang di perusahaan.	Tidak ada	Dari hasil wawancara terhadap seluruh pekerja dan pegawai di pelabuhan dikatakan bahwa terdapat hal yang dimaksud tetapi untuk dokumen SOP atau petunjuk kerja yang dimaksud tidak ada
	Keputusan terhadap peraturan perundang undangan, standar serta pedoman teknis yang relevan diperhatikan pada saat mengembangkan atau melakukan modifikasi atau petunjuk kerja.	SOP DISHUB	Dapat dilihat pada lampiran 3 mengenai SOP pelabuhan, hal yang dimaksud dibuat sesuai Peraturan Daerah dengan nomor dan tahun yang tertera pada SOP tersebut
	Terdapat sistem izin kerja untuk tugas berisiko tinggi.	Ijin Memasuki Kawasan	Contoh tugas berisiko tinggi adalah penanganan muatan serta pekerjaan di sekitaran dermaga, untuk memasuki area tersebut harus memiliki izin dari pihak pelabuhan
	Alat pelindung diri disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi layak pakai.	APD	Terdapat APD bagi seluruh pekerja sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya seperti rompi untuk petugas Dishub dan petugas Kemerhub, dan pakaian hazmat untuk petugas karantina
	Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.	SNI	APD yang digunakan oleh petugas sudah sesuai dengan standar yakni memiliki logo SNI
	Upaya pengendalian risiko dievaluasi secara berkala apabila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pada proses kerja.	Tidak ada	Berdasarkan observasi penulis tidak terdapat kegiatan seperti yang dimaksud

Aspek	Pertanyaan	Observasi	
		Bukti	Keterangan
Pengawasan	Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan.	Kepala Pelabuhan	Dari hasil wawancara terhadap kepala pelabuhan dan pekerja, segala aktivitas di pelabuhan di komando oleh kepala pelabuhan
	Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat risiko tugas.	Petugas mooring tidak menggunakan apd / Gambar 12	Dari hasil pengamatan, didapatkan adanya petugas yang bertugas melepaskan tali tambat tidak menggunakan APD dikarenakan kurangnya pengawasan.
	Pengawas/penyedia ikut serta dalam identifikasi bahaya dan membuat upaya pengendalian.	Tidak ada	Berdasarkan observasi penulis tidak terdapat kegiatan yang seperti yang dimaksud
	Pengawas/penyedia dikusertakan dalam melakukan penyelidikan dan pembuatan laporan terhadap terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kepada pengusaha atau pengurus.	Tidak ada	Berdasarkan observasi penulis tidak terdapat kegiatan seperti yang dimaksud
	Pengawas/penyedia ikut serta dalam proses konsultasi.	Tidak ada	Berdasarkan observasi penulis tidak terdapat kegiatan seperti yang dimaksud



		Observasi	
Aspek	Pertanyaan	Bukti	Keterangan
Seleksi dan Penempatan Personil	Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan tenaga kerja.  Penugasan pekerjaan harus berdasarkan kemampuan dan keterampilan serta kewenangan yang dimiliki.	Sertifikat Pekerja / Lampiran 4  Sertifikat Pekerja / Lampiran 4	Dapat dilihat pada lampiran 4 mengenai sertifikat bahwa persyaratan yang dimaksud sudah dijelaskan mengenai kegiatan apa saja yang akan dilakukan  Dapat di lihat pada lampiran 4 mengenai sertifikat bahwa persyaratan yang dimaksud sudah dijelaskan mengenai pekerja mampu untuk melakukannya
<b>Observasi</b>			
Aspek	Pertanyaan	Bukti	Keterangan
Area Terbatas	Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian risiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah yang memerlukan pembatasan izin masuk.  Terdapat pengendalian atas daerah/tempat dengan pembatasan izin masuk.  Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis.  Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis.	Tidak ada  Tidak ada  Tidak ada	Pengelola pelabuhan sudah mengetahui risiko kerja tiap-tiap daerah sehingga menerapkan pembagian wilayah dan menetapkan wilayah yang menjadi area terbatas  Terdapat petugas jaga untuk melakukan pengecekan identitas untuk memasuki wilayah tertentu pada pelabuhan  Fasilitas dan layanan menurut PM 37 Tahun 2015 tentang standar pelayanan penunjang angkutan laut, seperti nomor telepon darurat, APAR serta kotak P3K yang tidak berada pada tempat mudah dilihat  Tidak ada pedoman atau sertifikat yang jelas mengenai pemasangan rambu-rambu K3
<b>Observasi</b>			
Aspek	Pertanyaan	Bukti	Keterangan
Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi	Penjadwalan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman serta persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.  Semua catatan yang memuat data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan produksi harus disimpan dan dipelihara.  Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar.	Tidak ada  Lemari berbahan besi / Gambar 10  Tidak ada	Berdasarkan observasi penulis, tidak terdapat kegiatan seperti yang dimaksud  Semua dokumen seperti yang dimaksud disimpan dengan baik di dalam lemari berbahan besi  Berdasarkan observasi penulis, tidak terdapat pedoman atau sertifikat yang jelas mengenai sarana dan peralatan produksi



Observasi		Observasi	
Aspek	Pertanyaan	Bukti	Keterangan
Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi	Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan petugas yang kompeten dan berwenang.	Kepala Pelabuhan	Dari hasil wawancara mengenai poin ini, pemeriksaan dilakukan oleh Kepala Pelabuhan dan dipelihara oleh seluruh pegawai dan pekerja serta dan perawatan dilakukan oleh petugas eksternal
	Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa jika terjadi perubahan terhadap sarana dan peralatan produksi, perubahan tersebut harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.	Tidak ada	Berdasarkan observasi penulis, tidak terdapat dokumen seperti yang dimaksud
	Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana dan peralatan produksi dengan kondisi K3 yang tidak memenuhi persyaratan dan perlu segera diperbaiki.	Tidak ada	Berdasarkan observasi penulis, tidak terdapat dokumen seperti yang dimaksud
	Terdapat sistem untuk penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan.	Tidak ada	Jika ada sarana atau fasilitas yang rusak, tidak terdapat tanda atau peringatan yang jelas dan mencolok
	Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem penguncian pengoperasian (lock out system) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya.	Tidak ada	Jika belum saatnya untuk pemutaran maka tidak boleh ada yang berlalu lalang di daerah dermaga kecuali memiliki izin yang jelas
	Terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau orang lain yang berada di dekat sarana dan peralatan produksi pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan.	Tidak ada	Berdasarkan observasi penulis, tidak terdapat dokumen seperti yang dimaksud
	Terdapat penanggung jawab untuk menyertifikat bahwa sarana dan peralatan produksi telah aman digunakan setelah proses pemeliharaan, perawatan, perbaikan atau perubahan.	Kepala Pelabuhan	Meskipun waktu keberangkatan sudah sesuai, tanpa ada koordinasi atau perintah dari kepala pelabuhan, dermaga belum bisa dibuka
Observasi		Observasi	
Aspek	Pertanyaan	Bukti	Keterangan
Pelayanan	Apabila perusahaan dikontrak untuk menyediakan pelayanan yang tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan mengenai K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.	Tidak ada	Berdasarkan observasi penulis, tidak terdapat dokumen seperti yang dimaksud
	Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak, dan pelayanan tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.	Tidak ada	Berdasarkan observasi penulis, tidak terdapat dokumen seperti yang dimaksud



Observasi	
Aspek	Pertanyaan
Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat	Keadaan darurat yang potensial di dalam dan/atau di luar tempat kerja telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat telah didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di tempat kerja.
	Penyediaan alat/sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.
	Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko.
	Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja.
Bukti	Keterangan
Tidak ada	Berdasarkan observasi penulis, tidak terdapat kegiatan seperti yang dimaksud
Tidak ada	Berdasarkan observasi penulis, tidak terdapat dokumen yang mendukung atau kegiatan seperti yang dimaksud
Tidak ada	Berdasarkan observasi penulis, tidak terdapat kegiatan seperti yang dimaksud
Tidak ada	Berdasarkan observasi penulis, tidak terdapat dokumen seperti yang dimaksud

Observasi	
Aspek	Pertanyaan
Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat	Instruksi/prosedur keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas dan menyolok serta diketahui oleh seluruh tenaga kerja di perusahaan.
	Peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.
	Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau standar dan dinilai oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.
Bukti	Keterangan
Jalur evakuasi dan titik kumpul / Gambar II	Dapat dilihat dari gambar penanda jalur evakuasi mencolok dan sudah terpasang baik di dalam ataupun di luar gedung operasional pelabuhan serta mengarahkan seluruh orang menuju ke <i>assembly point</i>
Tidak ada	Dari hasil wawancara terhadap Kepala Pelabuhan, peralatan dan sistem tanda bahaya keadaan darurat yang disediakan diperiksa, diuji dan dipelihara oleh tim dari kementerian perhubungan
Tidak ada	Untuk jumlah dan jenis APAR dan kotak P3K sudah sesuai akan tetapi masi terkendala pada penempatannya yang masi belum pada tempatnya.

Observasi	
Aspek	Pertanyaan
Pertolongan Pertama pada Kecelakaan	Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis.
	Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bukti	Keterangan
Tidak ada	Berdasarkan PM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2008 untuk jumlah dan jenis sudah sesuai akan tetapi masih terkendala pada penempatannya.
Karantina Kesehatan	Berdasarkan PM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2008 untuk petugasnya sudah sesuai yakni petugas karantina kesehatan.



Aspek	Pertanyaan	Observasi	
		Bukti	Keterangan
Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat	Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kerja maupun sarana dan peralatan produksi yang mengalami kerusakan telah ditetapkan dan dapat diterapkan sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.	Tidak ada	Berdasarkan observasi penulis, tidak terdapat dokumen seperti yang dimaksud

